

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Ketimpangan ekonomi regional

Ketimpangan bervariasi selama tahun 2005 sampai 2013 yang terjadi pada antar Kabupaten/Kota antar Kabupaten, dan antar Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada ketimpangan antar Kabupaten/Kota mengalami penurunan (*convergence*) pada tahun 2005 sampai dengan 2011 yakni dari 0,402 menjadi 0,341 yang berarti bahwa Kabupaten/Kota mengalami penurunan ketimpangan. Selanjutnya hingga tahun 2013 mengalami peningkatan (*divergence*) nilai indeks williamson namun tidak signifikan yakni menjadi 0,346.

Kemudian untuk antar Kabupaten, menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif kecil yang berkisar dibawah angka 0,2 atau dapat dikatakan cenderung merata (mendekati 0). Tren ketimpangan dari tahun 2005 sampai 2013 cenderung bervariasi, dengan nilai indeks pada tahun 2005 mencapai 0,159 menjadi 0,161 pada tahun 2013.

Selanjutnya pada nilai indeks williamson antar Kota menunjukkan nilai yang juga bervariasi, pada tahun 2005 mencapai 0,393 dan menurun pada tahun 2006, kemudian meningkat kembali pada tahun 2007 dan menurun sampai tahun 2011. Nilai ini kembali meningkat sampai tahun 2013. Secara umum nilai ini menurun menjadi 0,363 pada tahun 2013.

(2) Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan

Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan baik antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten maupun antar Kota, dan secara spesifik hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar Kabupaten/Kota. Kemudian untuk antar kabupaten dan antar kota secara spesifik tidak satupun baik DBH, DAU, maupun DAK mempengaruhi ketimpangan.

Kemudian jika dilihat dari pengaruh secara individual yang diperoleh masing-masing bernilai negatif untuk DBH dan DAU, sedangkan DAK bernilai positif. Ini berarti bahwa DBH dan DAU menjadi penyebab menurunnya ketimpangan, sedangkan DAK menjadi penyebab meningkatnya ketimpangan ekonomi regional di Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dalam kaitannya dengan dana perimbangan adalah mengupayakan peningkatan alokasi DBH dan DAU setiap tahunnya dengan tetap mempertahankan peningkatan alokasi DAK yang tidak signifikan atau sesuai dengan kebutuhan.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik saran untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yaitu:

(1) Perlunya pengkajian terhadap sumber-sumber yang menjadi pertimbangan alokasi DBH, DAU dan DAK dari pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sehingga diharapkan DBH dan DAU yang berpotensi menurunkan ketimpangan dapat lebih ditingkatkan, sedangkan DAK yang berpotensi meningkatkan ketimpangan juga diharapkan meningkat namun tidak signifikan atau disesuaikan dengan kebutuhan dalam mencapai standar tertentu sesuai dengan tujuannya.

(2) Hendaknya dalam penelitian selanjutnya menambahkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain pendapatan daerah, dikarenakan PAD dan lain-lain pendapatan daerah merupakan pendanaan yang ikut serta dalam komposisi pendapatan daerah atau merupakan sumber pendanaan yang ikut menunjang pelaksanaan pembangunan.

